



PHILOSOPHICAL CURRICULUM OF CIVIC EDUCATION IN 1975-2013 IN INDONESIA

Gunawan Santoso^{1)*}

¹⁾Program Studi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jakarta Selatan

[*mgunawansantoso@umj.ac.id](mailto:mgunawansantoso@umj.ac.id)

Diterima: DD MM YYYY

Direvisi: DD MM YYYY

Disetujui: DD MM YYYY

ABSTRACT

Civics curriculum from year 1975-2013 are ultimately aims to make citizens say, act, and behave, based on Pancasila or spirit in everyday life that are run from the time school education to become a high school mature and become the pride of the nation bless yourself, family, school, state and nation with the moral soul/good and intelligent character who can advance and competitive in national and international era. Civics strength is on the Pancasila, the 1945 Constitution, values, morals, local knowledge and diversity in cultured. There are weaknesses in the teaching of Civics monotonous and more innovative not only focuses on the cognitive, affective and psychomotor while dispensed and not included on the national exam. Opportunities Civics still need a lot of development in the scientific body of knowledge. Threats Civics and free sex number of students who make the nation weak morals and act not see the value of Pancasila (say and behave without values). Civics solution through a process at body of knowledge of learning and practice of students in the school are monitored and assessed as a form of moral evaluation and student behavior.

Keywords: *philosophical curriculum; civic education*

PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan Indonesia sudah mengalami perkembangan sejak periode sebelum tahun 1947 hingga kurikulum tahun 2006, bahkan munculnya kurikulum baru yang akan menggantikan kurikulum lama yaitu kurikulum tahun 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan atau Mendikbud Muhammad Nuh (Kompas, 5/9/2012).

“Tidak ada kurikulum yang abadi. Kurikulum berubah karena perubahan zaman, bukan karena kurikulum sekarang yang jelek atau salah. Sudah benar itu di zamannya. Tapi zaman berubah dan kita harus ikut berubah”.

Analisisnya ialah proses pergantian Kurikulum tidak ada tujuan lain selain untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah agar siswa/pelajar di Indonesia menjadi sumber daya yang berkualitas di zamannya.

Menurut beberapa pakar, perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik di Indonesia maupun di negara lain, disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang setiap tahunnya selalu berkembang dan tuntutan zaman yang cenderung berubah. Perkembangan kurikulum dianggap sebagai penentu masa depan anak bangsa. Karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.

Salah satunya ide mengevaluasi kurikulum bergulir cepat setelah Wakil Presiden Boediono mempublikasikan gagasan tentang reformasi pendidikan melalui artikel “Pendidikan Kunci Pembangunan” Kompas, 27 Agustus 2012 (Buku Kompas, 2013: XIV). Artikel tersebut tampaknya merupakan uraian tentang pilar pembangunan nasional (*pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment*) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar RAPBN 2013. Yang menarik ide-idenya ialah mengusung paradigma pembangunan nasional, pemerintah ingin mengevaluasi (lagi) kurikulum pendidikan nasional, khususnya jenjang SD hingga SMA. Alasannya, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, “banyak persoalan di masyarakat yang erat kaitannya dengan pendidikan”, evaluasi dimaksudkan agar pembelajaran lebih

efektif. Untuk itu pemerintah membentuk tim evaluasi kurikulum dan meminta berbagai profesi dan keahlian melakukan evaluasi secara independen (Buku Kompas, 2013:XIII).

Mendikbud Muhammad Nuh, prihatin atas perilaku kekerasan yang melibatkan pelajar (dan mahasiswa) yang terus marak belakangan ini, dan berpikir bahwa kendurnya kurikulum pendidikan sekolah menjadi salah satu sebab kekerasan kaum pelajar tersebut, begitupun dengan para pemikir pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab dan kerja-bersama institusi keluarga, institusi masyarakat, dan diwaktu kemudian, institusi sekolah. Proses perubahan sosial dan terbentuknya keadaban publik hanya mungkin terjadi secara optimal jika ketiga pilar pendidikan berpungsi secara seimbang dan proporsional sesuai kapasitasnya (Buku Kompas, 2013:XVI).

Maka perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk segera dirubah dalam dunia pendidikan dikarenakan merupakan dasar dalam dunia pendidikan menuju warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) di masa depan sebagai cita-cita pendidikan Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 37 dinyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Tinggi”. Pendidikan Kewarganegaraan diberbagai jenjang pendidikan harus tetap ditingkatkan dan dikembangkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan mewujudkan

warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Tulisan berikut ini mencoba memberikan pilihan jawaban atas permasalahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013. Permasalahan pertama makna filosofis apa yang ada pada Sekolah Menengah Atas diberikan materi pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun 1975-2013 di Indonesia. Kedua apa dan bagaimana analisis SWOT, kurikulum SMA tahun 1975-2013. Penelitian bertujuan mendeskripsikan arti kebermaknaan secara filosofis dan analisis SWOT kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas tahun 1975-2013, diharapkan menghasilkan temuan komposisi materi Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam kurikulum SMA tahun 1975-2013 sebagai evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan serta antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu teknik untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, Sumber bahan cetak (kepuustakaan), meliputi buku, jurnal, makalah dan literatur hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, sumber data berupa dokumen analisis yang meliputi hasil dokumen-dokumen kenegaraan tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah atas dari tahun 1975-2013. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi

dokumentasi, dan studi pustaka.. Sementara itu proses analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan hasil kajian terhadap data temuan hasil studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan konsep dan teori yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Berikut disajikan berdasarkan fokus kajian penelitian, yakni:

Hasil

Berdasarkan analisis peneliti dalam menelaah studi dokumentasi dan studi kepustakaan didapatkan rangkuman oleh peneliti dalam beberapa aspek analisis yaitu: landasan hukum PKn, latar belakang kurikulum, nama kurikulum, nama PKn, tujuan PKn, jumlah jam pelajaran PKn SMA, model pembelajaran PKn, Berakhirnya kurikulum PKn, ruang lingkup, serta analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan solusi). Kurikulum yang dibahas peneliti yaitu kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA pada tahun 1975-2013, yang dikaji lebih dalam mengenai analisis SWOT kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA pada tahun 1975-2013. Hasil yang didapatkan peneliti memberikan kontribusi sebagai evaluasi pasang surutnya Pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA dari tahun 1975-2013, yang secara jelas telah memberikan data dan fakta perubahan yang signifikan, baik itu perubahan nama mata pelajaran atau substansi materi pelajaran yang memberikan dasar dan arahan sebagai pembeda kurikulum

sebelumnya untuk memberikan keunggulan dan kebermaknaan di setiap kurikulum. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama dan materinya secara berkala sesuai dengan perubahan kurikulum yaitu pada tahun 1975, 1978, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Efek perubahan kurikulum membentuk Pendidikan Kewarganegaraan kadang menjadi kuat kadang menjadi lemah, bahkan bersumber

pada kekuatan moral, kadang bersumber pada kekuatan hukum, pada kekuatan politik atau bahkan pada kekuatan hukum dan politik.

Dibawah ini adalah hasil rangkuman peneliti tentang analisis kurikulum PKn jenjang SMA.

Tabel 1. Rangkuman Analisis Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan Perkembangan Kurikulum PKn SMA dari tahun 1975-2013 di Indonesia

No.	Aspek Analisis	Kurikulum 1975	P4 tahun 1979	Kurikulum 1984	Kurikulum 1994	Suplemen 1999	Kurikulum 2004	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Landasan hukum PKn	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan GBHN	Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989	Tap MPR dan UU PN no 2 tahun 1989	UU SPN no. 20 tahun 2003	UU SPN no. 20 tahun 2003	UU SPN no. 20 tahun 2003
2.	Latarbelakang kurikulum	Tuntutan perubahan zaman	Tuntutan perubahan eksekutif dan legislatif	Tuntutan perubahan zaman	Tuntutan perubahan zaman perubahan prilaku rakyat	Tuntutan perubahan politik	Tuntutan perubahan zaman dan tenaga kerja	Tuntutan perubahan zaman dan IPTEK	Tuntutan eksekutif, Prilaku masyarakat dan IPTEK
3.	Nama kurikulum	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Pembaharuan Kurikulum (PK)	Kurikulum keterampilan proses (KKP)	Kurikulum keterampilan proses (KKP)	Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)	Kurikulum 2013 (Kutilas)
4.	Nama PKn	PMP	PMP+P4	PMP	PPKn	PPKn	Kn	PKn	PPKn
5.	Tujuan PKn	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang pancasilais	Warganegara yang berakhlak	Warganegara yang berakhlak	Warganegara yang kritis demokratis	Warganegara yang taat pada pancasila dan UUD 1945
6.	Juml. jam PKn SMA	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	Model PKn	Siswa aktif	Siswa aktif	CBSA	Keterampilan	Keterampilan	Pengalaman	Memecahkan solusi, inkuiri	<i>Contextual learning</i>
8.	Berakhiranya kurikulum PKn	Siswa Kesulitan dalam praksis	Adanya revisi pada P4	Minimnya keterampilan siswa	Reformasi politik eksekutif	Reformasi pendidikan	Belum memiliki kemampuan	Serat materi	Serat materi, jam Pelajaran kurang, dan tidak UN

<p>9.</p>	<p>Ruang lingkup</p>	<p><i>civics</i>, sejarah kebangsaan, kejadian setelah Indonesia merdeka, UUD 1945, masing-masing sila Pancasila, pesan pentingnya pambangunan (seperti rencana pambangunan lima tahun dan GBHN) bagi bangsa Indonesia, doktrin kenegaraan yang spesifik, membahas persoalan moral dan sebagainya, visi misinya berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)</p>	<p>hak azasi manusia, azas dan makna keadilan, UUD 1945, lembaga-lembaga negara, badan peradilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, dan kajian terhadap Pancasila itu sendiri.</p>	<p>(1). Nilai, moral dan norma serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (2). Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wadah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.</p>	<p>1999 ketika masa pemerintahan B. J. Habibie lahir istilah IPTEK dan IMTAK yang diikuti lahirnya kurikulum Imtak, isinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran.</p>	<p>1. Persatuan bangsa dan negara; 2. Nilai dan norma (agama, kesucilaan, kesopanan dan hukum); 3. Hak Asasi Manusia; 4. Kebutuhan hidup warga negara; 5. Kekuasaan dan politik; 6. Masyarakat demokratis; 7. Pancasila dan konstitusi negara; 8. Globalisasi; namun materi mata pelajaran ini mengusung misi pendidikan nilai dan moral.</p>	<p>Persatuan dan Kesatuan bangsa; Norma, hukum dan peraturan; Hak asasi manusia; Kebutuhan warga negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi.</p> <p>1. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, 2. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
-----------	-----------------------------	---	--	--	--	---	---	--

		la dan UUD 1945							
10.	Dokumen PKn	Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.	adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), maka materi PMP didasarkan pada isi P-4 tersebut.	adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan perlunya adanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.	masih ada yang perlu disempurnakan salah satunya penyederhanaan P4 / refisi P4.	salah satunya mengilangkan P4 dalam materi PPKn, karena terlalu sarat materi, tumpang tindih (<i>overlapping</i> dan <i>overload</i>), terlalu banyak hafalan, sentralistik, dan kurang mencerminkan sifat desentralistik.	Indonesia di masa depan diharapkan tidak akan mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungka hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.	terlepas dari pemerintah yang berkuasa, melainkan diberikan kebebasan sekolah untuk mengelola dan mengurus visi dan misinya untuk mencapainya tanpa harus menunggu perintah dari pusat pendidikan maka, hasilnya menumbuhkan generasi mandiri, berteknologi, berpikir cerdas dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.	kutulas/kurikulum 2013 yang memiliki tujuan untuk membekali kemampuan keterampilan secara kritis cerdas dan agar lebih sempurna menjadi manusia yang mandiri dan lebih setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan sumber konten materi pelajaran 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11.	Solusi	Memperhatikan muatan materi Pancasila dan UUD 1945. Secara filsafat keilmuan PKn memiliki ontologi dasar		PPKn perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial-kultural		Pembudayaan nilai-moral lebih banyak dipelajari atau <i>learned</i> dengan peran guru/dosen/pemanggota yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat dominatif	PKn bersifat terpisah (<i>separated</i>) dan pendekatannya jangan berorientasi pada pengalaman (<i>experience centered</i>) dengan pola pengorganisasian lingkungan meluas, melainkan	Tuntutan akan penyempurnaan PKn sesungguhnya terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PKn Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu	Djahir (1979) pernah menegaskan bahwa materi PKn hendaknya lebih menitikberatkan pada pembinaan watak, pemahaman dan penghayatan nilai dan pengamalan

	<p>ilmu politik khususnya konsep <i>politic democracy</i> maka digunakan untuk aspek <i>duties and rights of citizen</i>. Sebenarnya P4 dan GBHN itu tidak ada yang salah, manusi anyalah yang menyalahgunakannya sehingga perlu pembenahan dengan refisi, reposisi, dan reevaluasi terhadap pengembalaian eksistensi P4 yang bebas dari birokratik.</p>	<p>yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional-pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah sedangkan pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau <i>tought</i> dengan peran guru/dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat integratif.</p>			<p>menggunakan belajar sambil berbuat (<i>learnig by doing</i>), belajar memecahkan masalah sosial sederhana (<i>social problem solving learning</i>), belajar melalui pelibatan sosial (<i>socio-partisipatory learning</i>), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural dalam lingkungan sekitar sampai tingkat provinsi (<i>enculturation and socializen</i>).</p>	<p>memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensi onal (Winarno, 2013: 4).</p>	<p>n Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa, pembinaan siswa untuk melihat kenyataan, fokus belajar pada konsep yang benar menurut dan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, penguasaan konsep dalam PKn memiliki kedudukan yang penting selain aspek afektif dan perilaku.</p>
--	--	---	--	--	--	--	---

(Sumber: Analisis diolah peneliti dari kajian perkembangan kurikulum PKn SMA tahun 1975-2013, puskur; depdiknas).

Berdasarkan hasil penelitian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 1975-2013 adalah untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas dan bertanggungjawab (*to be good, smart, and responsible citizens*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri khas tersendiri yang terdiri dari 3 akar ilmu pada ilmu pengetahuan yaitu: nilai moral, hukum dan politik. Secara filosofis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta solusi memberikan pengaruh yang luar biasa pada eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 1975-2013. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kuat ketika kurikulum tahun 1975, 1984 dan 1994 yang mengusung unsur utama pada nilai moral, namun unsur ilmu hukum dan ilmu politik dimarginalkan. Kelamahan pada kurikulum ditahun itu adalah adanya pihak birokratik yang berkuasa dengan sengaja ikut andil dalam indoktrinasi mengembangkan dan memainkan peranannya untuk terus melanggengkan kekuasaan sebagai pencitraan. Beriringnya waktu peluang kurikulum ini memberikan jalan besar mata pencaharian bagi para pakar dan pengembang Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan pelatihan dan penataran pada P4 di sektor pendidikan masyarakat dan pegawai negeri ataupun swasta. Ancaman yang terjadi banyaknya kritik tajam dari para komunitas Pendidikan Kewarganegaraan karena banyaknya ketimpangan pendidikan yang memberikan efek pada hasil pembelajaran siswa menjadi tidak bermakna bahkan adanya ketidakpatuhan para pemuda pelajar Indonesia dikala tahun 1999 yang secara serentak

melawan rezim orde baru yang sesat itupula kekuatan Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijatuhkan melalui keputusan presiden B.J. Habibie. Solusi pada kurikulum ini jika berawal dari pemerintah maka yang bisa memberhentikan/menghilangkannya adalah hanya melalui pemerintah pula, hal ini dilakukan demi kelangsungan Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis dan tanpa adanya unsur paksaan lagi.

Kurikulum 2004, 2006 dan 2013, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki efek yang mendalam sejak perubahan orde baru, seolah kekuatan moral sudah mulai kritis bahkan seolah tidak dibutuhkan lagi, padahal pada kurikulum ini warganegara Indonesia merindukan adanya pendidikan nilai moral yang mendalam hingga meresap pada masyarakat lagi, yang tanpa adanya kepentingan birokratik dan pelanggaran kekuasaan yang otoriter melainkan dengan cara demokratis, damai, dan merakyat. Kuatnya kurikulum ini diawali dengan ilmu hukum dan politik namun nilai moralnya sangat tidak dijadikan panduan lagi seolah kebosanan dan rasa takut terulang kembali seperti di masa silam. Solusinya Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi bangkit ketika kurikulum mendatang mulai dilakukan revisi, reposisi, dan revaluasi pada konten secara komprehensif dengan melihat substansi filosofis nilai moral sebagai bahan utama dan substansi ilmu hukum dan politik sebagai penunjang/pelengkap keberhasilan warganegara yang baik, cerdas dan demokratis. Penelitian ini menitik beratkan pada solusi utama sebagai jalan membentuk Pendidikan kewarganegaraan yang maju dan modern dengan berbasis nilai moral berkarakter, berwatak Pancasila, yang taat

dan patuh pada hukum bangsa dan negara Indonesia, dengan cara menjalankan dunia birokrasi politik yang damai, jujur, adil, dan demokratis.

Pembahasan

Makna filosofis PKn SMA itu menitikberatkan pada penciptaan pelajar yang beradab/bijaksana dalam segala hal, dimana bijaksana itu merupakan tingkat tertinggi dari segala perilaku, dimana maknanya yaitu: filosofis PKn sebagai pembentukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban, filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa, filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler, filosofis PKn sebagai jatidiri kekuatan pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia dan filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

Makna filosofis Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

- a. Filosofis PKn sebagai pembentukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban

Filsafat PKn sebagaimana filsafat pendidikan disiplin ilmu dipengaruhi oleh faham filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu-ilmu sosial baik dalam kajian ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dengan ini Branson (1998:12) mengatakan "...warganegara tidak hanya harus sadar akan hak-hak mereka saja, tetapi juga harus menggunakan hak-hak itu secara bertanggung jawab dan merekapun harus menunaikan tanggung jawab pribadi dan kewarganegaraan yang diperlukan bagi suatu masyarakat yang adil, bebas, dan berdaulat.

Sebagai warga negara kita harus mengenal hak-hak dan kewajiban, dan juga kewajiban negara terhadap warganya. Sejak kecil setiap murid sudah diajarkan untuk bersikap kritis demokratis terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan kewajiban negara terhadap warganya. Maka, warganegara akan menjadi segan terhadap pemerintahan dan taat pada hukum pemerintahan jika kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan sudah diberikan pemerataan pada rakyatnya.

- b. Filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa

"...UUD harus hidup dalam sanubari bangsa Indonesia. Baik dalam segi pengetahuan terhadap UUD maupun dalam bertingkah laku yang sesuai dengan UUD. Sehingga tugas PKn adalah untuk mendekatkan warga negara dengan konstitusi bukan hanya melalui pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal agar negara Indonesia mampu menjadi negara yang demokratis yang menjamin kesejahteraan (Jimly Asshiddiqie, 2012).

Warga negara yang beriman dan bertakwa serta memiliki hati yang bersih menjadi dambaan semua negara, begitupun dengan Indonesia yang memberikan nilai kebebasan dalam beribadah, persaudaraan, tanpa mengenal kasta dan derajat yang dipraksiskan dalam *living reality* dengan bentuk moral yang terpuji sebagai contoh panutan dan tuntunan bagi setiap yang melihatnya, sebagai sosok yang diidolakan yang dapat dijadikan tiruan bagi yang lain terhadap sikap prilakunya/akhlaknya

dalam setiap kehidupan dimanapun kapanpun dia berbuat yang tujuan akhirnya adalah menghasilkan *happy ending* di sekitarnya.

c. Filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler

Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas ilmiah. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial-kultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat. Domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial-kultural satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi kebajikan dan kebudayaan kewarganegaraan (*civic virtue and civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keyakinan diri kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan, dan kemampuan kewarganegaraan. Oleh karena itu objek kajian PKn saat ini sudah lebih luas daripada embrionya, sehingga bidang kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural PKn benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi PKn dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi

manusia, dan pendidikan demokrasi. Karakteristik inilah yang dijadikan indikasi bahwa PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi yang becirikan sifat multifaset (Sapriya, 2012: 30-31).

Salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara

(Winataputra dan Budimansyah, Ed., 2012).

- d. Filosofis PKn sebagai jatidiri pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia

Jatidiri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat dan tidak tertutup. Jatidiri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik. Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa (Udin Saripudin Winataputra, 2011).

Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sesuai fungsi dan tujuannya pendidikan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan operasional penuh dengan pesan *“yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,*

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beban dan tanggung jawab dari negara secara hukum dan fundamental sebagai tugas untuk melaksanakan pembenahan dan pembentukan watak moral pancasila sebagai jatidiri asli bangsa dengan memperkokoh pemajuan IMTAK (iman dan takwa) yang bersih lahir batin dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) negara yang mampu berdayasaing internasional dalam era global yang dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan negara dan bangsa.

- e. Filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

“...aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Visi Pendidikan Nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003). Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, DepDikNas berhasrat untuk berhsrat pada tahun 2025 menghasilkan INSAN INDONESIA YANG CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Cerdas komprehensif tersebut meliputi : cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual,

cerdas kinestetik... (Budimansyah & Suryadi, 2008: 20-22)

Sikap pengokohan dalam setiap perbedaan diberbagai bidang baik agama, adat, budaya, dan kepercayaan lainnya merupakan media perekat yang harus diberikan suplemen khusus dari ruh Pancasila oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warganegara yang saling menganggap saudara dalam setiap perbedaan dengan sikap ramah tamah dan tolong menolong yang dapat menumbuhkan kepercayaan atas segala perbedaan dalam bangsa dan negara, yang terciptanya aturan masyarakat yang akan membawa kita pada rasa adil, tentaram, aman dan damai.

KESIMPULAN

Pertama makna filosofis PKn SMA itu menitikberatkan pada penciptaan pelajar yang beradab/bijaksana dalam segala hal, dimana bijaksana itu merupakan tingkat tertinggi dari segala perilaku, dimana maknanya yaitu: filosofis PKn sebagai pementukan watak bangsa yang taat hukum dalam keseimbangan hak dan kewajiban, filosofis PKn sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa, filosofis PKn sebagai mata pelajaran kurikuler, filosofis PKn sebagai jatidiri kekuatan pondasi pendidikan bangsa dan negara Indonesia dan filosofis PKn sebagai mental ligatur multikultural fluralisme bangsa dalam satu cita-cita nasional dan pemodernan bangsa dan negara Indonesia.

Kedua kekuatan PKn pada kurikulum tahun 1975-1994 adalah pada nilai moralnya sebagai pembentukan watak, kemudian pada kurikulum tahun 2004 PKn terletak pada kekuatan politik, sedangkan kekuatan kurikulum PKn tahun 2006 terletak pada bidang hukum, namun pada kurikulum

2013 ini adanya kombinasi dari ketiga kekuatan ini yakni diusung dari nilai moral, politik, dan hukum namun kekuatan utama dalam kurikulum ini masih terlihat seras pada substansi politik dan hukum namun unsur moralnya malah cuman sebagai bahasan kecil saja. Kemudian sebagai pendorong lainnya didapat dari Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang memiliki visi, tentulah membutuhkan warga bangsa yang juga memiliki wawasan, kesadaran dan perilaku yang mendukung visi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk penggabungan individu-individu agar menjadi warga bangsa yang memiliki karakter yang seturut yang visi kebangsaanya.

Ketiga Kekuatan PKn ada pada Pancasila, UUD NRI 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal dan kebinekaan dalam berkebudayaan. Kelemahan PKn ada pada sisi pengajaran yang bersifat monoton tidak inovatif (*overload and overlapping content*) dan lebih menitik beratkan hanya pada kognitif, sedangkan afektif dan psikomotorik ditiadakan serta tidak dimasukan pada ujian nasional. Peluang PKn masih perlunya banyak perkembangan keilmuan dalam *body of knowledge* berbasis penguatan utama moral. Ancaman PKn banyaknya pelajar bertawuran dan seks bebas yang menjadikan moral anak bangsa lemah dan bertindak tidak melihat nilai Pancasila (berkata dan berperilaku tanpa nilai). Solusi PKn melalui pembelajaran dan proses praktik siswa di sekolah yang diawasi dan dinilai sebagai bentuk evaluasi moral dan perilaku siswa. Materi PKn yang terbaik adalah berasal Indonesia asli bukan jiplakan dari negara lain, diantaranya adalah Pancasila, Pembukaan UUD 1945,

UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda dan Merah Putih.

2. Rekomendasi

a. Bagi Dosen PKn

Dosen hendaknya sebagai para pengembang Pendidikan Kewarganegaraan sering melakukan evaluasi menangani segala permasalahan yang akan datang.

b. Bagi Pengembang Kurikulum PKn/Pusat Kurikulum (Puskur)

Para pakar, kurikulum PKn yang dikembangkan ke depan diharapkan memiliki dasar nilai moral pancasila yang kuat dan sumber pelengkap hukum dan politik dipersingkat dikarenakan kurikulum masa depan PKn yang diinginkan target manusia berkarakter dan bermoral yang unggul. Kemudian jadikanlah PKn memiliki mata pelajaran praktik dalam berbagai bidang di masyarakat, sekolah, bangsa dan negara jika seandainya PKn ini diterapkan dalam mata pelajaran berbasis psikomotorik maka demokrasi dan kedewasaan serta watak warga negara lama-kelamaan akan terbina dan membentuk jiwa pancasilais.

REFERENSI

Cholisin. (2006). Pemilihan kepala daerah dalam rangka perspektif peran PKn. Yogyakarta: Jurnal Civics, Volume 3, No. 2, Desember 2006, halaman 60-78.

Creswell. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kusuma, Deden Cahaya. (2013). *Analisis Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum 2013*. Bandung: Jurnal Analisis Komponen-Komponen Pengembangan

Kurikulum Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia 2013, halaman 1-21.

Sariono, (2013). Kurikulum Generasi Emas. E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3, ISSN : 2337-3253, (halaman 1-9).

Udin S. Winataputra. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Landasan, konteks, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: Program Pascasarjana UPI.

Udin S Winataputra,.(2008). "Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa" dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Acta Civicus SPs UPI, 2, (1), 1-16.

Winarno. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan persekolahan: Standar isi dan pembelajarannya*. Jurnal Civics, Volume 3, No. 1, Juni 2006 halaman 231-350, Jurusan PKn.H, FISE, UNY.

_____.(2009). *Kewarganegaraan Indonesia: dari sosiologis menuju yuridis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wahab, A.A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung. Alfabeta

_____.(2000). *New paradigm and curriculum design for new Indonesian civic education. Paper The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March 29, 2000, at Bandung*.

_____.(2007). Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Ilmu dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.

Winataputra, Udin Saripudin. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis)*: Bandung. Widya aksara

- press.
_____ (2007). *Materi pelatihan dosen pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Risalah Resmi dan Sumber-Sumber Lain**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). Kurikulum sekolah menengah atas 1975a: Buku I ketentuan-ketentuan pokok. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1975). Kurikulum sekolah menengah atas 1975b: Buku II B bidang studi pendidikan moral Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1985). Mengemban masa depan: Kumpulan sambutan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, buku kedua. Jakarta: Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). Perkembangan pendidikan dasar dan menengah tahun 1945-1999. Jakarta: Dikdasmen, Depdikbud.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). Kurikulum 1994 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). GBPP PPKn suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2003e). Kurikulum 2004: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2007). Kajian Kebijakan Kurikulum PKN: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. (2010). Sejarah kurikulum tahun 1975-2004: Naskah akademik. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara